

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>

Timtim dan Intelektual Kita

Ariel Heryanto

PERISTIWA Dili 12 November yang lalu, seperti ditulis David Jenkins, merugikan banyak pihak. Peristiwa itu menghantam banyak pihak yang mengupayakan dan sedang menyaksikan kemajuan luar biasa ke arah perundingan perdamaian dalam beberapa minggu ini.

Akibat menyeluruh

Menurut sejumlah sumber, penduduk Timor Timur (Timtim) minggu lalu kehilangan puluhan anggota keluarganya. Pada hari-hari berikutnya anak-anak tak ada yang berani ke sekolah karena khawatir sekolah akan diserbu oleh aparat keamanan. Rumah-rumah digeledah dan ada penahanan.

Tapi pemerintah RI juga terpukul oleh peristiwa yang sama. Peristiwa ini terjadi di saat-saat pemerintah RI baru melambung tinggi di mata masyarakat internasional sebagai bagian dari pimpinan badan-badan internasional, seperti Gerakan Non-blok, Sekjen PBB, anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Organisasi Buruh Internasional. Peristiwa itu terjadi persis menjelang perjalanan Presiden Soeharto ke beberapa negara lain yang pasti akan menanyakan peristiwa berdarah itu.

Sejumlah negara telah melancarkan kecaman sekeras-kerasnya kepada Indonesia di seluruh jaringan media massa elektronik di dunia. Mereka adalah Selandia Baru, Inggris, Belanda, Masyarakat Ekonomi Eropa, Sekjen PBB, Amerika Serikat, Portugal dan juga Australia. Senat Amerika bahkan sedang menyusun resolusi pembekuan bantuan militer untuk Indonesia.

Peristiwa yang sama juga merepotkan pimpinan negara yang bersahabat dengan pemerintah RI. Australia misalnya. Berbeda dari Amerika yang masih belum sreg dengan penggabungan Timtim menjadi wilayah Indonesia, Australia sejak 1978 mengakui wilayah Timtim sebagai provinsi ke-27 RI. Bahkan tahun lalu pengakuan ini diperkuat dengan perjanjian Celah Timor antara RI-Australia yang berarti menampik tuduhan pihak lain bahwa perjanjian itu sebagai perampokan sumber alam milik bangsa-bangsa lain.

Belasan tahun pemerintah Australia dan pihak swasta (wartawan, akademikus, pengusaha) pendukungnya harus berdebat dengan rakyatnya yang masih mempersoalkan Timtim. Mereka menolak berbagai upaya dan usulan untuk memberikan harapan bagi perjuangan kemerdekaan nasional Timtim dengan dua alasan praktis.

Pertama, menurut mereka, dengan bergabung dengan RI rakyat Timtim akan lebih sejahtera. Argumentasi ini diberikan terutama pada masa yang lalu. Kedua, sudah tidak ada harapan lagi bagi perjuangan melawan integrasi ini. Argumentasi ini diberikan sesudah pihak anti-integrasi mengalami serangan bertubi-tubi dari angkatan perang RI. Saat ini diperkirakan tinggal beberapa puluh gerilyawan bersenjata Fretilin yang masih tersisa.

Yang diserang rakyat Australia bukan cuma pemerintah RI, tetapi juga pemerintah Australia sendiri yang dianggap terlalu memihak pemerintah RI. Serangan itu pernah ditangkis

dengan semboyan "kita harus memahami kepribadian dan budaya mereka yang berbeda dari kita". Tapi kejadian Dili membuat kalimat itu sekarang dijadikan bahan olok-olok belaka.

Apa yang dinamakan kebudayaan dan kepribadian Indonesia diartikan sebagai sifat sejenis makhluk yang mengerikan. Jauh sebelum peristiwa Dili, saya pernah ditanya sopir taksi tentang negeri asal saya. Ketika saya bilang saya dari Indonesia, reaksi spontannya: "Saya ngeri dengan bangsa kamu. Lihat di Timtim."

Intelektual Indonesia

Peristiwa Dili juga mendorong orang untuk membongkar kembali setumpuk kasus lain, yang selama ini dianggap kurang diperhatikan, dengan anggapan bahwa kasus Timtim sudah selesai dan tak perlu dipersoalkan lagi. Salah satunya yang agak menggigit untuk intelektual Indonesia ialah tentang sikap mereka sendiri.

Banyak pengamat asing, khususnya Australia, yang tak habis mengerti mengapa aktivis dan intelektual Indonesia seakan-akan acuh tak acuh pada kasus Timtim. Mereka melawan sensor, penindasan dan kesewenang-wenangan, berdemonstrasi, menuntut keadilan, keterbukaan dan demokrasi. Mereka bicara tentang Tiananmen dan Kuwait. Tapi bungkam dalam hal Timtim. Mengapa?

Perkecualian memang ada tapi sangat minim. Intelektual Indonesia memang tak perlu membuntuti sikap rekan-rekannya di luar negeri untuk menolak atau menyetujui integrasi Timtim. Intelektual Indonesia bisa menyatakan pandangan yang mandiri. Tapi persoalan lain jika mereka kelihatannya bungkam, buta persoalan itu, atau acuh tak acuh.

Professor Emiritus Herb Feith, sahabat para menteri negara kita, dan sahabat banyak intelektual Indonesia yang kritis, adalah salah seorang resi kaum sarjana Australia yang paling banyak merenungkan soal ini. Dalam konferensi besar tentang Indonesia bulan lalu di Adelaide, ia membahas ini. Ketika diminta koran *The Age* untuk berkomentar tentang kejadian Dili, ia membahas soal ini.

yang sedikit banyak berbobot intelektual, mendapat banyak perhatian dan analisis di Indonesia sendiri. Mereka dikaji dan diperdebatkan dalam kaitan dengan kelas menengah atau pun proses demokratisasi. Para peminat pengkajian ini suatu saat, cepat atau lambat, akan berhadapan dengan pertanyaan yang digulati Herb Feith tanpa harus lebih dahulu atau terutama berminat dengan kasus

galak oleh beberapa pihak luar itu?

Sejauh apa yang dipertimbangkan Herb Feith, mungkin tak ada yang bisa kita tolak. Tapi mungkin kita perlu memberikan pertimbangan tambahan yang mungkin kurang diperhatikan para pengamat asing seperti Herb Feith. Misalnya soal pertimbangan kekuatan intelektual/aktivis di banyak negeri seperti Indonesia terhadap proses perubahan politik yang berbeda daripada rekan-rekannya di negeri seperti Australia.

Spekulasi ini mungkin terdengar agak keterlaluan dan kurang pantas diajukan seorang akademikus Indonesia. Tapi ada baiknya kita pertimbangkan semua bahan kajian secara kritis.

Menurut pengamatan selintas, aktivis dan intelektual di banyak negeri seperti Indonesia mempunyai daya-pengaruh yang lebih besar dalam proses legitimasi ataupun delegitimasi tata sosial dan kekuasaan di negerinya, ketimbang rekan-rekan mereka di negeri "demokratis" seperti Australia atau Amerika Serikat.

Di negeri yang tersebut belakangan ini setiap hari bisa terjadi pemogokan nasional oleh kaum buruh. Setiap hari dan hampir setiap orang boleh mencaci-maki presiden, menteri, atau seluruh pranata kekuasaan negara. Tapi kelihatannya semua itu memberikan sangat sedikit sekali, seandainya benar ada, pengaruh terhadap keadaan yang diserangnya.

Di negeri seperti Indonesia, kaum intelektual atau aktivis ini jumlahnya lebih sedikit. Tapi mereka tak perlu berteriak, cukup bergumam atau berbisik untuk menimbulkan kejutan dan guncangan pada proses legitimasi atau delegitimasi *status-quo*. Biar pun (atau mung-

kin karena itu) mereka, seperti banyak intelektual di negeri komunis, mengalami banyak sensor dan intimidasi untuk tidak berbicara jujur dan lantang.

Mungkin persoalannya bukan (semata-mata) karena intelektual-aktivis Indonesia lebih kuat atau hebat daripada rekan-rekannya di negeri asing. Mungkin karena proses legitimasi di negeri seperti Indonesia jauh lebih lembek atau rapuh ketimbang yang ada di banyak negeri "demokratis". Itu sebabnya pers asing juga sering menjadi ancaman bagi banyak pemerintahan di negeri-negeri seperti yang ada di Asia Tenggara dan RRC.

Jika dulu kita melihat bagaimana penasaran para pejabat RI melihat kenyataan bahwa pemerintah Australia tidak mampu menindak tegas para wartawan Australia yang suka mengkritik pemerintah Indonesia, kita kini juga harus melihat betapa tak berdayanya sejuta kecaman dari intelektual dan aktivis Australia selama belasan tahun untuk mengubah kebijakan pemerintahan Australia terhadap Indonesia dalam kaitan dengan Timtim.

Dapat dipastikan ada banyak faktor penyebab mengapa intelektual dan aktivis Indonesia bisa bersikap lain dari rekan-rekannya di luar negeri dalam menanggapi kasus Timtim. Perbedaan ini sendiri tak berarti salah atau jelek. Tapi ada baiknya kita pahami mengapa demikian. Kita perlu mengumpulkan pertimbangan sebanyak mungkin dalam usaha memahami dan bersikap sekritis mungkin dalam mengkajinya.***

**) Ariel Heryanto, mahasiswa pascasarjana yang sedang menyelesaikan tesisnya di Monash University. Artikel ini dikirim langsung dari Melbourne, Australia.*

Intelektual Indonesia memang tak perlu membuntuti sikap rekan-rekannya di luar negeri mengenai integrasi Timtim. Intelektual kita bisa menyatakan pandangan yang mandiri. Tapi persoalannya lain jika mereka kelihatannya bungkam, buta persoalan itu, atau acuh tak acuh.

la memahami tentang langkanya bahan informasi tentang Timtim bagi para aktivis dan intelektual Indonesia, sehingga banyak di antara mereka yang tidak tahu-menahu seluk-beluk Timtim. Ia juga menyadari betapa sensitifnya kasus ini bagi pihak keamanan RI. Tapi ia juga mencatat bahwa ada semacam kemalasan dari pihak aktivis atau intelektual kita untuk menjamah soal ini, karena (atau dengan alasan) kasus itu terlalu sulit dipahami dan jika diketahui akan terlalu rumit dipecahkan. Dengan kata lain, mereka mencari soal-soal yang lebih gampang saja untuk dibikin ribut.

Selama ini gerakan LSM, aktivis mahasiswa, bantuan hukum, pers dan akademikus

Timtim.

Benarkah kasus Timtim lebih sulit dipelajari daripada berbagai gagasan yang tak kalah radikal dalam bidang teori ilmu sosial, analisis politik-ekonomi, feminisme, atau lingkungan hidup? Jika benar, mengapa? Hanya karena sensor?

Ataukah ini hanya persoalan waktu? Kasus Timtim, seperti kata seorang pengamat, bukanlah "sudah 16 tahun", tetapi "masih baru 16 tahun". Atau, banyak yang tahu tapi tak cukup ada yang mau memulai bersuara seperti tim peneliti UGM pimpinan Prof Mubyarto dan Dr Lukman Sutrisno? Bepa banyak intelektual dan aktivis di Yogyakarta sendiri yang sudah membaca laporan dari UGM yang dianggap cukup